



# 1 Kegiatan Dukungan Penataan Hukum

Japan International Cooperation Agency (JICA) mendukung penataan hukum di negara-negara Asia yang sedang beralih ke perekonomian pasar, dalam rangka bantuan hibah.

ICCLC menerima tugas untuk melakukan kegiatan bantuan di bidang hukum perdata dan perdagangan dari JICA, sehingga kami mendorong penataan hukum dengan memperoleh kerja sama dari anggota pengurus ICCLC dan pihak-pihak terkait dari Kementerian Hukum dll. Selain itu juga memperdalam komunikasi dengan pihak terkait hukum dan peserta pelatihan yang datang dari negara mitra ke Jepang, untuk menjaga hubungan persahabatan sampai masa yang akan datang.

## ●● Penataan Sistem Hukum Vietnam

Proyek dukungan penataan sistem hukum pertama oleh Jepang adalah untuk Vietnam, yang dimulai pada tahun 1996. Sejak itu, proyek dukungan terus berlanjut selama lebih dari dua puluh tahun. Proyek Dukungan Reformasi Hukum dan Peradilan yang Menargetkan Tahun 2020 selesai pada akhir Desember 2020 dan Proyek untuk Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pengembangan dan Penegakan Hukum akan dilaksanakan dari Januari 2021 hingga Desember 2025.

## ●● Penataan Sistem Hukum Kamboja

Jepang telah melaksanakan proyek dukungan penataan sistem hukum sejak tahun 1999 dan telah bekerja sama dalam menyusun draft UU Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata Kamboja. Setelah Proyek Penyuluhan UU Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata, Proyek Peningkatan Operasi UU Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata diselenggarakan sejak April 2017 hingga Maret 2022.

## ●● Proyek Peningkatan Pembinaan SDM Bidang Hukum di Laos

Kami telah menyelenggarakan proyek dukungan penataan sistem hukum sejak 2003. Proyek Peningkatan Pembinaan SDM Bidang Hukum telah diselenggarakan dan Proyek Peningkatan Dukungan Penataan Hukum diselenggarakan dari Juli 2018 hingga Juli 2023.

## ●● Penataan Sistem Hukum Indonesia

Proyek dukungan penataan sistem hukum dimulai sejak tahun 2007. Saat ini, kami sedang melaksanakan Proyek Peningkatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsistensi Hukum untuk Meningkatkan Lingkungan Bisnis dari Desember 2015 hingga September 2021.

## ●● Penataan Sistem Hukum Myanmar

Kami telah melaksanakan proyek dukungan penataan sistem hukum sejak tahun 2013. Proyek Dukungan Penataan Hukum pertama diselesaikan pada Mei 2018 dan Proyek Dukungan Penataan Sistem Hukum dan Peradilan saat ini sedang dilaksanakan hingga Mei 2023.

## ●● Pelatihan di Jepang untuk Negara-Negara Lain

Pelatihan untuk tujuan dukungan penataan sistem hukum telah diperluas ke Bangladesh, Sri Lanka dan Uzbekistan selain negara-negara target yang disebutkan di atas, dan Yayasan juga mendukung pelatihan yang dilakukan oleh JICA dan Kementerian Hukum.

# 2 Penyelenggaraan Simposium dan Seminar

Kami menyelenggarakan secara tunggal dan menyelenggarakan secara bersama simposium dan seminar umum untuk memperdalam saling pengertian antara pihak-pihak terkait peradilan, profesi hukum dan akademisi Jepang dan negara-negara lain di bidang hukum perdata dan hukum perdagangan dengan negara-negara Asia, termasuk negara-negara yang tercakup dalam lingkup dukungan penataan sistem hukum.

## ●● Seminar Hukum Perdata dan Perdagangan antara Jepang dan China

Untuk memperdalam pemahaman yang lebih baik di bidang hukum perdata dan perdagangan dengan China yang sedang mendorong pengembangan sistem perekonomian pasar, setiap tahun diselenggarakan seminar secara bergantian di Jepang dan China. Kami memperoleh informasi mengenai gerakan saat itu dalam hal revolusi sistem hukum yang terjadi di China dari para ahli China. Bersamaan dengan itu, kami juga menyediakan kesempatan kepada pihak China agar dapat memahami sistem hukum Jepang.



Seminar Hukum Perdata dan Perdagangan antara Jepang dan China  
Diselenggarakan pada November 2019 (Tokyo)

## ●● Simposium Penelitian Hukum Perdata dan Perdagangan di Asia dan Pasifik dengan Membandingkannya

Simposium dalam bidang hukum perdata dan perdagangan diselenggarakan, dengan mengundang akademisi dan praktisi dari negara dan kawasan Asia dan Pasifik. Simposium ini diposisikan sebagai sebuah kesempatan untuk mengemukakan rangkuman secara menyeluruh sebagai hasil penelitian sistem hukum perdata dan perdagangan di Asia dan Pasifik dengan mempertimbangkannya.

## ●● "Seminar Kanazawa" Hukum Perdata dan Perdagangan Internasional

Seminar ini diselenggarakan bertujuan untuk pertukaran informasi terkait hukum bisnis di kawasan Asia dan Asia Tenggara, serta untuk pertukaran pendapat dan informasi tentang potensi kerja sama antar donor dan kebutuhan dukungan penataan sistem hukum di bidang hukum bisnis dan hukum ekonomi di kawasan tersebut, dengan mengundang para pakar dari dalam maupun luar negeri. Pada TF 2019, telah diselenggarakan seminar yang bertema "Asia Tenggara - Dari Kondisi Ekspansi Bisnis Saat Ini" di Kota Kanazawa.

## ●● Simposium dan Seminar

Kami menyelenggarakan simposium dan seminar dengan tema yang sangat menarik perhatian di bidang hukum perdata dan perdagangan di Jepang maupun negara-negara tertentu dengan kerja sama organisasi dan pemangku kepentingan terkait, termasuk para ahli dari negara-negara tersebut.

Salah satu yang utama adalah yang diselenggarakan bersama Asian Business Law Forum (ABLF), yang dimulai pada TF 2019. ABLF yang didirikan pada tahun 2019 oleh organisasi pendiri, di mana yayasan ini sebagai salah satunya, telah menjadi tiga jembatan yang menghubungkan Asia dan Jepang, sektor publik dan swasta, dan antar generasi. Tujuannya untuk menyediakan wadah/forum berbagi ilmu dan melakukan diskusi yang beraneka ragam mengenai berbagai hukum Asia yang cakupannya luas mulai dari hukum bisnis hingga hak asasi manusia. Pada tahun 2020, kami mengadakan tiga simposium, salah satunya dengan tema "Bisnis dan Hukum di Asia."

Selain itu, untuk negara-negara tertentu, pada TF 2019, kami telah menyelenggarakan ceramah oleh para ahli dari Mongolia tentang "Sistem Pendaftaran Perdagangan di Mongolia".

Kami sedang melakukan penelitian tentang tema-tema khusus di bidang hukum perdata dan perdagangan di negara-negara Asia, mengumpulkan serta mempublikasikan materi yang terkait di bidang "bisnis dan hak asasi manusia".

### ●● Penelitian Sistem Hukum Perdata dan Perdagangan di Asia dan Pasifik dengan Mempertimbangkannya

Kelompok pengkaji terbentuk terutama oleh akademisi dan praktisi di daerah Kansai, dan selama ini telah dilaksanakan penelitian mengenai sistem hukum pembankrutan, sistem hukum agunan, ADR (Alternative Dispute Resolution / Alternatif Penyelesaian Sengketa), hak kekayaan intelektual, hukum perusahaan internasional, tuntutan kuasa pemegang saham, sistem audit, sistem penyediaan informasi perusahaan di negara-negara Asia dan Pasifik.

Untuk Vietnam, Indonesia, Thailand dan Malaysia, kami melakukan penelitian praktik hukum perusahaan seperti perjanjian pemegang saham, sistem saham dan EXIT, yang direncanakan untuk tiga tahun mulai TF 2018.

#### Publikasi Hasil Penelitian Selama Ini

1. Sistem hukum pembankrutan di negara-negara Asia dan Pasifik
2. Pembankrutan perusahaan dan hukum agunan di negara-negara Asia dan Pasifik
3. Kondisi saat ini dan perspektif ADR di negara-negara Asia dan Pasifik
4. Pelaksanaan (enforcement) hak kekayaan intelektual di negara-negara Asia
5. Perspektif M&A internasional di negara-negara Asia
6. Kondisi sebenarnya tentang tuntutan kuasa pemegang saham dan perlindungan pemegang saham di Asia
7. Kondisi sebenarnya tentang sistem audit di Asia yang sedang berkembang dan masalahnya
8. Kondisi sebenarnya tentang sistem penyediaan informasi perusahaan di kawasan Asia dan masalahnya
9. Tata kelola perusahaan empat negara di Asia Tenggara

### ●● Penelitian Kemitraan antara Jepang dan Korea Selatan

Sejak tahun 1999, masing-masing 5 orang anggota perwakilan yang terkumpul dari Mahkamah Agung Korea Selatan serta Kementerian Hukum, Biro Hukum dan pengadilan Jepang, untuk melakukan penelitian terutama tentang sistem administrasi sipil. Tidak hanya diadakan kuliah oleh pakar dari kedua negara saja, tetapi juga melakukan penelitian dari sisi praktik, selama seminggu di Seoul dan seminggu di Tokyo.

### ●● Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh Komisi PBB untuk HAM menjadi tersebar luas di komunitas internasional sebagai kriteria global untuk praktik bisnis yang saat ini harus dipenuhi oleh semua negara dan perusahaan terkait bisnis dan HAM. Untuk meningkatkan kesadaran banyak orang, termasuk perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di negara-negara Asia, Yayasan telah mempublikasikan di situs webnya terjemahan bagian tentang tanggung jawab perusahaan dari "Panduan Penafsiran" yang disiapkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR), serta menyusun "Tanggung Jawab Perusahaan dalam Menghormati HAM dan Panduan Penafsirannya" dan mempublikasikannya bersama.

### ●● Penelitian Bersama terkait Dukungan Penataan Sistem Hukum

Yayasan ini bekerja sama dengan penelitian bersama Kementerian Hukum di negara-negara Asia terkait dengan dukungan penataan sistem hukum. Pada TF 2019, penelitian bersama dilakukan di Mongolia, Myanmar dan Timor Leste

Silakan lihat situs web kami (<https://www.icclc.or.jp>) karena saat ini kami mempublikasikan banyak informasi sebagai berikut:

- ☒ Jurnal "ICCLC", yang isinya mengenai Dewan Pimpinan, Majelis, laporan keuangan dan situasi keuangan seperti rencana dan anggaran usaha serta laporan usaha
- ☒ "ICCLC NEWS", yang merupakan newsletter tentang hasil seminar dan simposium
- ☒ Materi yang terkait dengan usaha dan keuangan
- ☒ Artikel yang dikontribusikan oleh pengurus yayasan, dan lain-lain.

### Menerima Anggota Baru

#### ■ Fondasi Keuangan ICCLC

##### Aset dasar

Sumbangan dari 25 perusahaan yang merupakan pendiri	50 juta yen
---	-------------

##### Dana pengoperasian

Iuran anggota tahunan dari anggota berbadan hukum	73,53 juta yen
---	----------------

Pendapatan dari usaha yang diamanatkan	20,90 juta yen
--	----------------

	52,63 juta yen
--	----------------

(TF 2019)

#### ■ Iuran tahunan untuk anggota berbadan hukum

Jumlah iuran adalah 200.000 yen per keanggotaan, dengan minimal satu keanggotaan per perusahaan.

Silakan hubungi sekretariat ICCLC untuk informasi pendaftaran.

#### ■ Badan Hukum Kepentingan Publik

ICCLC telah diakreditasi sebagai Badan Hukum Kepentingan Publik dari Perdana Menteri pada tanggal 18 Maret 2013, dan selesai pendaftaran peralihan ke Badan Hukum Kepentingan Publik pada tanggal 1 April 2013.



Ketua

**Kenji Miyahara**

Penasihat Khusus, Sumitomo Corporation

Saya mulai menjabat sebagai ketua yayasan pada Mei 2003. Hubungan antara Jepang dengan negara-negara Asia menjadi semakin erat dan memiliki saling ketergantungan dalam segala bidang. Bekerjasama erat dengan Kementerian Hukum, JICA, JETRO dan organisasi terkait lainnya, yayasan ini akan terus berpartisipasi dan bekerjasama secara aktif dalam proyek-proyek pendukung seperti penataan sistem hukum, pembentukan langkah-langkah penyelesaian sengketa dan pengembangan personel profesi hukum untuk negara-negara Asia dari sudut pandang sektor swasta. Kami memohon pengertian dan dukungan lebih lanjut dari para pihak yang terkait.

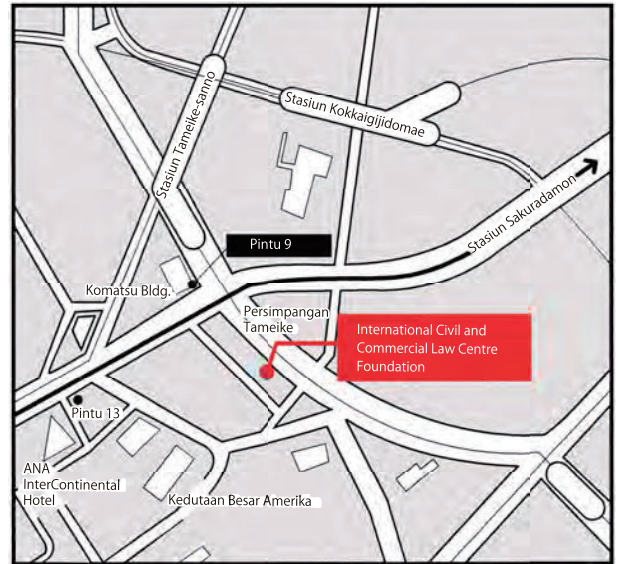


Presiden

**Kotaro Ohno**

Pengacara  
Mantan Wakil Menteri Hukum, Jaksa Agung

Saya mulai menjabat sebagai presiden yayasan pada Juni 2017. Dalam dunia yang semakin mengglobal, pertukaran orang, barang dan informasi menjadi lebih cepat dan meluas. Gerakan tersebut menciptakan kemakmuran yang tak terukur, tetapi di sisi lain, aspek-aspek negatif seperti pelebaran jurang antara si kaya dengan si miskin di suatu kawasan dan kemerosotan lingkungan dunia ditunjukkan. Agar negara-negara Asia dapat mencapai pembangunan seimbang yang saling menguntungkan, penting untuk meningkatkan fungsi pencegahan dan penyelesaian konflik serta menegaskan prinsip dan aturan hukum yang sama. Tujuan dari yayasan ini adalah memberikan kontribusi dalam pertukaran informasi, dukungan penataan sistem hukum, pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, sebagai syarat dasar untuk tujuan tersebut. Kami memohon dukungan dan kerja sama dari banyak pihak yang terkait.



Stasiun Tameike-sanno di Tokyo Metro Ginza Line / Namboku Line  
Keluar dari pintu 9 (persimpangan Tameike), 3 menit dengan berjalan kaki

# ICCLC

International Civil and  
Commercial Law Centre Foundation  
(Yayasan Pusat Hukum Perdata  
dan Komersial Internasional)

Akasaka Habitation Bldg., 1-3-5 Akasaka, Minato-ku,  
Tokyo 107-0052, Japan  
Tel:03-3505-0525 Fax:03-3505-0833

Sekretaris Jenderal : Hiromasa Aoki  
Deputi Sekretaris Jenderal : Kouichi Togami

E-mail "icclc-sa@js5.so-net.ne.jp"  
Home Page: <https://www.icclc.or.jp>

